

Bombana Raih Peringkat Kedua Penilaian Pelayanan Publik di Sultra

Kendari, sultranet.com - Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis (7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.



Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Kemendes PDT dan GP Ansor Bersinergi Bangun Desa

Jakarta, sultranet.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan

pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting

yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.

Menkomdigi: Orang Tua Harus Dampingi Anak di Ruang Digital selama Ramadan

Jakarta, sultranet.com - Dalam rangka menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendidik bagi anak-anak selama bulan suci Ramadan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses ruang digital. Ajakan ini disampaikan dalam Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji. Rabu (5/03/2025)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas pesatnya arus informasi digital yang mudah diakses oleh anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan, orang tua diimbau untuk aktif menyaring dan mendampingi agar anak-anak tidak terseret arus informasi yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya. Ramadan dianggap sebagai momentum emas untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui kegiatan bersama seperti

salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, serta diskusi tentang kisah-kisah inspiratif. Para pejabat menilai, sinergi antara keluarga dan pemerintah sangat penting dalam membentuk karakter anak yang cerdas, inovatif, dan berintegritas sejak dini.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendampingi anak di era digital. Ia mengajak masyarakat agar menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki interaksi keluarga, mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, dan memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta nilai-nilai keagamaan.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ayah dan bunda, untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan baik bersama keluarga dan anak-anak tercinta. Jadikan keluarga sebagai teladan bagi anak-anak kita, dan dampingi mereka dalam mengakses informasi,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Menko PMK Pratikno juga memberikan arahan agar momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memulai langkah-langkah positif di bidang pendidikan dan keteladanan. Ia menilai, kegiatan bersama keluarga tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga menjadi wahana untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter anak secara menyeluruh.

“Mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memulai hal-hal yang lebih baik. Mendidik dan memberikan teladan kepada anak, agar anak-anak Indonesia semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, serta cerdas dan inovatif,” ungkap Pratikno.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menambahkan pentingnya mengurangi penggunaan gawai selama Ramadan guna meningkatkan interaksi langsung antara orang tua dan anak. Menurutnya, menyisihkan waktu minimal satu jam setiap hari untuk beribadah bersama dan berbagi cerita kebaikan dapat membantu membangun komunikasi yang lebih hangat dan mendidik.

“Mari kita tinggalkan gawai sejenak dan manfaatkan waktu bersama anak-anak.

Lakukan ibadah bersama, salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, serta berbagi cerita tentang kebaikan yang dilakukan anak hari ini," kata Arifah Fauzi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa interaksi intensif antara orang tua dan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah generasi emas yang harus dibimbing dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi pemimpin berkualitas.

"Ayo, orang tua ajak anaknya ngobrol. Kalau sudah ngobrol dan saling menyayangi, interaksi dengan anak akan semakin erat. Semoga di bulan Ramadan ini, ibu dan bapak bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya, di mana pun mereka berada," tegas Wihaji.

Acara Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, Menteri Agama, Nazaruddin Umar, serta Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Para pejabat berharap, sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya aman, tetapi juga mendidik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan kreatif. Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola waktu dan informasi, serta memperkuat fondasi pendidikan karakter sejak dini.

Melalui kebijakan dan arahan para pejabat, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk membangun budaya komunikasi yang sehat dan pendampingan digital yang optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawal perkembangan digital anak, sehingga tercipta generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kaya nilai moral dan budaya.

Bupati Muna Terpilih Fokus Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan

MUNA, Sultranet.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

"Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan," kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.



Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.

Polsek Lantari Jaya Gelar Pasar Murah 1.000 Paket, Ringankan Beban Warga di Bulan Ramadan

Bombana, sultranet.com - Polsek Lantari Jaya, Polres Bombana, menggelar pasar murah sebanyak 1.000 paket sembako guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (6/3/2025) dan bertujuan meringankan beban warga, terutama di bulan suci Ramadan.

Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat dan menekan dampak inflasi lokal. Dengan harga lebih murah dibanding harga pasar umum, warga di wilayah

hukum Polsek Lantari Jaya dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kapolsek Lantari Jaya, Prasetyo Nento, S.H., menjelaskan bahwa pasar murah ini juga bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta mengurangi potensi gangguan keamanan akibat tekanan ekonomi yang meningkat di bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga dan menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Kapolsek Lantari Jaya.

Pasar murah ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, termasuk subsidi dari Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) untuk gula pasir. Harga gula yang biasanya Rp17.200 per kilogram kini dijual hanya Rp14.200. Sementara itu, subsidi untuk bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan susu kaleng diberikan oleh Kapolsek Lantari Jaya beserta anggota Polsek melalui sistem urunan atau sumbangan.

Warga yang hadir dapat membeli paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar umum. Sebagai perbandingan, harga paket sembako di pasar umum mencapai Rp102.000, sedangkan di pasar murah ini hanya Rp80.000 per paket. Paket tersebut berisi beras 3 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan susu kaleng.

Camat Rarowatu Utara, Hajar Aswad, S.E., M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polsek Lantari Jaya yang telah menggelar pasar murah ini. Program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang membutuhkan di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus berfluktuasi,” ujar Hajar Aswad.



Kegiatan pasar murah ini juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kriminalitas yang kerap meningkat menjelang Idul Fitri. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat lebih terjaga.

Acara berlangsung dengan lancar dan tertib hingga selesai. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur atas adanya program pasar murah ini. Salah satu warga, Siti, mengaku sangat terbantu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasar umum.

“Alhamdulillah, harga sembakonya lebih murah dibanding di pasar. Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengadakan pasar murah ini,” ujar Siti.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., yang mengapresiasi inisiatif pasar murah yang digelar oleh Polsek Lantari Jaya. Menurutnya, program seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Polri harus selalu hadir untuk masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti saat ini.

Dengan adanya pasar murah ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Kapolda Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya pasar murah ini, Polsek Lantari Jaya berharap dapat terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. Program ini juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam menjaga kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Kapolda Sultra Tinjau Pasar Murah Inisiatif Polsek Lantari Jaya di Bombana

Bombana, sultranet.com - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Lurah Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sultra. Turut hadir Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Camat Rarowatu Utara Hajar Aswad, S.E., M.P.W., Lurah Aneka Marga Justang Busasa, S.Ip., serta Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) H. Paijan. Sekitar 500 warga turut serta dalam kegiatan ini.

Pasar murah yang diinisiasi Polsek Lantari Jaya ini menyediakan 600 paket sembako dengan harga subsidi. Paket yang seharusnya seharga Rp102.000 ini dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp80.000 per paket. Setiap paket berisi 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, dan 3 kg beras. Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan PT. Prima Alam

Gemilang (PAG), PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), CV. MSV, dan Toko Ahmad Mas.



Dalam tinjauannya, Kapolda Sultra memastikan bahwa kegiatan pasar murah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia juga menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga bersama Wakapolda, Kapolres Bombana, serta Direktur PT. JBM.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan yang kebutuhan pokoknya meningkat,” ujar Kapolda Sultra Irjen Dwi Irianto.

Selain itu, ia mengapresiasi kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.



Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa pasar murah ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” kata Kapolres.



Kegiatan pasar murah berlangsung dengan lancar hingga pukul 14.40 WITA. Setelah acara, Kapolda Sultra dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari. Situasi selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Pertamina Tampo Pastikan BBM Aman, Masyarakat Diminta Tidak Ragu

MUNA, Sultranet.com - Depot Terminal Pertamina Tampo memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan ke tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah, aman dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kepastian ini disampaikan untuk merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencampuran BBM jenis pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, mengungkapkan

bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi langsung di lapangan serta pengujian laboratorium terhadap sampel BBM di dua SPBU, yakni SPBU CBK Wamponiki dan SPBU Kambara di Muna Barat. Dari hasil pemeriksaan, kualitas BBM dinyatakan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

“Kami langsung turun ke lapangan dan melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas BBM di beberapa SPBU. Hasilnya menunjukkan bahwa BBM yang didistribusikan tetap terjaga mutunya dan tidak mengalami perubahan kualitas,” ujar Ali Hakka, Kamis (6/3/2025).

Lebih lanjut, Ali Hakka menjelaskan bahwa sistem penerimaan dan distribusi BBM di Depot Terminal Pertamina Tampo dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Sebelum BBM dibongkar dari kapal ke tower penampungan, dilakukan pemeriksaan sertifikat mutu. Selain itu, pengecekan kembali dilakukan sebelum BBM dikirim ke SPBU guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Kami memiliki standar operasional yang ketat dalam penerimaan BBM dari kapal, termasuk pengecekan dokumen, sertifikasi mutu, serta pengujian ulang sebelum BBM masuk ke dalam tangki penyimpanan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas BBM yang sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Ali Hakka menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi terhadap kualitas BBM, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Pihaknya juga membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk keluhan terkait kualitas BBM agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Jika ada pihak yang mencoba memanipulasi kualitas BBM di luar jalur distribusi resmi, maka akan ada sanksi tegas. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu dengan kualitas BBM yang kami distribusikan. Jika ada keluhan, segera laporkan kepada kami agar kami bisa melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, C. - Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, menjelaskan bahwa sebelum BBM didistribusikan ke SPBU, dilakukan serangkaian pemeriksaan mutu dan kualitas. Hal ini mencakup pengecekan sebelum BBM dimasukkan ke dalam tangki mobil, serta inspeksi ulang di pintu gerbang keluar untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar Pertamina.

“Kami memastikan setiap BBM yang keluar dari terminal telah melalui serangkaian pengecekan berlapis. Mulai dari tahap awal hingga sebelum mobil tangki keluar dari depot, kami melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam mutu dan volume BBM yang dikirim,” jelas Edwin.

Selain itu, Terminal Pertamina Tampo juga mendapatkan pengawasan rutin dari pihak berwenang, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Pengawasan ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar yang berlaku.

“Setiap tahun, kami selalu menjalani audit dan pengawasan dari pihak terkait guna memastikan bahwa proses distribusi BBM tetap sesuai dengan regulasi dan tidak ada penyimpangan dalam standar operasional kami,” tambahnya.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina Tampo juga mengajak awak media untuk melihat langsung proses pembongkaran BBM di lokasi terminal. Langkah ini bertujuan agar publik dapat memahami secara langsung bagaimana sistem distribusi BBM dijalankan dengan standar tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, C. - Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, serta Jr Spv II Maint, Plan. & Sales Services, Husada Hartadi. Mereka memberikan penjelasan detail mengenai proses penerimaan, penyimpanan, serta distribusi BBM dari Terminal Tampo ke berbagai SPBU di wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan prosedur ketat yang diterapkan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang didistribusikan. Pertamina juga terus berkomitmen untuk menjaga mutu BBM yang sampai ke tangan konsumen.

Pertanian Bombana Jadi Andalan Wujudkan Swasembada Pangan

Bombana, Sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan. Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Komitmen itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 6 Maret 2025.

Sarif mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Bombana semakin mendapatkan perhatian serius. Ia menyebutkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Dengan potensi yang kita miliki, Bombana bisa menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Sarif. Ia menambahkan bahwa luas lahan yang tersedia, serta dukungan program dari pemerintah pusat, memberikan peluang besar untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

Menurut Sarif, langkah strategis yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan akses lahan produksi. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan Bombana seperti padi, kelapa sawit, dan kakao.

Tidak hanya soal infrastruktur, Dinas Pertanian Bombana juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. “Kami ingin memastikan petani di Bombana dapat mengakses teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Itu termasuk penggunaan pupuk organik, benih unggul, hingga mekanisasi pertanian,” terang Sarif.



Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga menjadi fokus utama. Dinas Pertanian Bombana aktif mendorong pembentukan dan penguatan kelompok tani serta koperasi. Tujuannya agar para petani lebih mudah mendapatkan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran hasil produksi.

Untuk meringankan beban produksi, pemerintah daerah juga terus menggulirkan bantuan berupa subsidi pupuk dan alat pertanian. Sarif optimistis, kebijakan ini akan berdampak positif pada produktivitas dan pendapatan petani.

“Kami harap program swasembada pangan ini terus menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin Bombana bisa menjadi daerah lumbung pangan yang tangguh dan mandiri,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa dengan berbagai program dan kebijakan strategis yang dijalankan saat ini, sektor pertanian akan tumbuh lebih kuat, memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

Bersama Pemdes, Babinsa Koramil 01 Rumbia Gotong Royong Bersihkan Kanan Kiri Jalan di Desa Lampata

Bombana, SultraNET .| - Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama perangkat desa dan warga melaksanakan gotong royong membersihkan kanan kiri jalan di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memperlancar akses jalan bagi masyarakat. Kamis, (06/03)

Sertu Amiruddin mengungkapkan bahwa gotong royong ini merupakan wujud kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Kegiatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, jalan desa yang bersih juga meminimalisir risiko kecelakaan akibat jalanan yang tertutup rumput atau sampah," ujarnya.

Kepala Desa Lampata, Filudin, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi keterlibatan Babinsa serta warga. "Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia dalam kegiatan ini. Dengan kebersamaan, desa kita akan menjadi lebih nyaman dan asri," ucapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin menekankan pentingnya gotong royong sebagai budaya yang harus terus dilestarikan. "Gotong royong adalah salah satu bentuk kepedulian sosial yang harus tetap dijaga. Dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik," pungkasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama perangkat desa berkomitmen untuk terus menggalakkan kegiatan serupa guna menciptakan desa yang bersih, sehat, dan nyaman.

Sultra Dorong Penguatan Satu Data Lewat Pembinaan Statistik Sektoral

Kendari, SultraNet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling, melalui Zoom Meeting, Rabu, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra yang selama ini telah bekerja keras mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem yang lebih terukur dan akurat.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan strategis daerah yang salah satunya ditentukan oleh kualitas data sektoral.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS) di tingkat daerah, serta menegaskan komitmen Pemprov Sultra terhadap keterbukaan data publik sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., turut memberikan pernyataan penting dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan nilai evaluasi statistik Sultra, yang tahun lalu berada pada angka 2,9.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan data sektoral tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang terbuka dan dapat diakses masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan data yang dapat diakses masyarakat. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita kepada publik,” ujarnya.

Pembinaan Statistik Sektoral ini diikuti oleh perwakilan dari 18 OPD yang menjadi sasaran pembinaan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip SDI di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara BPS, Diskominfo, dan Bappeda dianggap sebagai tulang punggung penguatan tata kelola data sektoral daerah. Dengan adanya dukungan lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan kualitas dan keterpaduan data guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pembukaan resmi kegiatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hugua melalui sambungan Zoom Meeting. Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi antara

lembaga yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan semangat membangun data yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menjadikan SDI sebagai pilar utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat dan cepat.